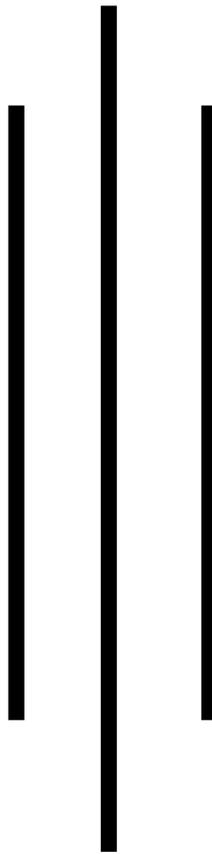


**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERHUBUNGAN
*Jl. Raya Kaligondang Km.2,4 Telp. (0281) 891427 Fax. (0281) 891475***

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan Penyusunan Renja.....	4
D. Sistematika Dinas Perhubungan	5
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022	6
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023.....	16
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023	18
A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan	18
B. Program dan Kegiatan	19
BAB V. PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Perhubungan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan (Dinhub), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari anggaran Pemerintah Propinsi (Bantuan Gubernur).

Substansi Renja OPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2021, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 serta Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu“ **Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia**”. Visi tersebut diyakini mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-7, yaitu : *”Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan”*. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan pemukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu : *“Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan”*

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga tahun anggaran 2022
3. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2021
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya pembangunan.

D. SISTEMATIKA RENJA DINAS PERHUBUNGAN

I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja Dinhub Tahun 2023.

II. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022

III. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

IV. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

V. Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

A. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022

1. Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2022

Tabel 2.1 :
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2022

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.	1.800.000.000	1.824.972.000	101,39
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000	613.053.700	76,63
3.	Retribusi Terminal :	90.791.000	78.086.500	86,01
	a. Terminal Bukateja.	58.675.000	47.993.000	81,79
	b. Terminal Kejobong.	10.000.000	7.647.500	76,48
	c. Terminal Jompo	15.960.000	15.960.000	100,00
	d. Terminal Penaruban	6.156.000	6.486.000	105,36
4.	Retribusi Ijin Trayek.	107.750.000	150.500.500	139,68
Jumlah		2.798.541.000	2.666.612.700	95,29

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 2.798.541.000,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 2.666.612.700,-** atau tercapai **95,29%**. Dengan kata lain perolehan PAD secara kumulatif tersebut belum mencapai target yang di tetapkan yaitu sebesar 95,29%, sedangkan target PAD yang tidak tercapai perolehannya yaitu Retribusi Terminal (Retribusi Terminal Kejobong dan Bukateja), serta Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

a) Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar Rp. 12.114.857.000,-Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran 2022 (Kondisi s.d. 31 Desember 2022)

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Sisa Pagu Anggaran	Prosentase Keuangan	Realisasi Fisik
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.	Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 4.500.000	Rp. 4.490.000	Rp. 10.000	99,78%	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.378.305.000	Rp. 4.240.679.064	Rp. 137.625.936	96,86%	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 5.418.000	Rp. 5.394.000	Rp. 24.000	99,56%	100%
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp.100.000.000	Rp.97.718.950	Rp. 2.281.050	97,72%	100%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 60.974.000	Rp. 57.822.800	Rp. 3.151.200	94,83%	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.075.590.000	Rp. 1.075.590.000	-	100%	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.269.784.000	Rp. 1.259.961.387	Rp. 9.822.613	99,23%	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 228.383.000	Rp. 227.095.900	Rp. 1.287.100	99,44%	100%
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 4.079.597.000	Rp. 3.819.578.327	Rp. 260.018.673	93,63%	100%

10.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 65.600.000	Rp. 63.108.500	Rp. 2.491.500	96,20%	100%
11.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 108.875.000	Rp. 108.777.950	Rp. 97.050	99,91%	100%
12.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 447.351.000	Rp. 437.744.450	Rp. 9.606.550	97,85%	100%
13.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 13.990.000	Rp. 13.868.000	Rp. 122.000	99,13%	100%
14.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 25.990.000	Rp. 20.934.000	Rp. 5.056.000	80,55%	100%
15.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 155.000.000	Rp. 153.788.100	Rp. 1.211.900	99,22%	100%
16.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 95.500.000	Rp. 82.578.651	Rp. 12.921.349	86,47%	100%
	Jumlah	Rp. 12.114.857.000	Rp. 11.794.006.061	Rp. 320.850.939	97,35%	100%

2. Capaian Rentra Dinas Perhubungan Tahun 2022

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : $\geq 91\%$;
- b. Baik : 76 – 90,99%;
- c. Cukup : 66 – 75,99%;
- d. Kurang : 51 – 65,99%;
- e. Sangat Kurang : $\leq 50,99\%$.

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 98,79% atau kategori “Sangat Baik”.

Adapun seluruh pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dapat diuraikan, sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	87,80%	80,48%	92,5%	80,48%	87,01%

- 1) Tujuan : Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Angkutan Jalan.

Konektivitas angkutan umum merupakan kondisi dimana seseorang mudah untuk

mengakses angkutan umum untuk menuju ke tempat tujuan. Oleh karenanya sangat penting dilakukan pengukuran terhadap konektivitas layanan angkutan umum ini.

Menurut tabel diatas perbandingan realisasi tahun 2020 dan realisasi 2021 terlihat menurun, hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan pribadi semakin tahun semakin bertambah sedangkan angkutan umum semakin tahun semakin berkurang, ditambah dampak dari *covid-19* menyebabkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum semakin rendah. Dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2022 Rasio Konektivitas Angkutan Jalan masih dibawah target, dari target 92,5% hanya tercapai sebesar 80,48%, penurunan ini dikarenakan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor ataupun mobil menyebabkan semakin berkurangnya angkutan umum perkotaan dan angkutan umum pedesaan sehingga menyebabkan trayek yang ada mengalami kekosongan angkutan, akibatnya trayek tersebut menjadi mati dan tidak bisa melayani penumpang. Trayek angkutan pedesaan dari 26 trayek yang ada sebanyak 5 trayek yang sudah tidak aktif yaitu Jalur C (Bobotsari-Limbasari), Jalur T (Kejobong-Binorong), Jalur V (Pagutan-Kalikabong), Jalur X (Kebogohan-Ps.Bojongsari), Jalur Y (Selanegara-Slinga), untuk trayek angkutan perkotaan dari jumlah trayek yang ada sebanyak 14 trayek terdapat 2 trayek yang sudah tidak aktif, yaitu jalur trayek nomor 11 (Gemuruh-Padamara) dan jalur trayek nomor 14 (Karangpule) selain faktor diatas yang menyebabkan penurunan rasio konektivitas angkutan jalan adapun faktor lain yaitu semakin bertambahnya kendaraan pribadi sehingga minat untuk menggunakan angkutan umum menyebabkan trayek yang sudah ada menjadi sepi tidak ada penumpang.

Capaian indikator tujuan ini dapat dicapai melalui 1 Program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dapat mengetahui berapa jumlah angkutan umum yang aktif melayani penumpang di terminal, serta melakukan pembinaan kepada awak angkutan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan peremajaan kendaraan, sehingga penumpang bisa lebih nyaman saat menaiki moda transportasi umum, serta melakukan pembinaan tentang kesadaran

untuk berkeselamatan di jalan sebagai langkah untuk mewujudkan angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan.

Data angkutan umum tersebut bisa dilihat pada uraian indikator kinerja Persentase Angkutan Umum yang Aktif.

- 2) Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat serta Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
 - a. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan
 - b. Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik;
 - c. Persentase Angkutan Umum yang Aktif.

Adapun penjelasan terkait capaian sasaran kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65,72	66,31	68,75	71,51	04,01%

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), DPA, Rencana Aksi, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0-100

dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diperoleh nilai **71,51 kategori “BB” (Sangat Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut :

Tabel 2.4. Komponen Nilai SAKIP 2022

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	2,4	3,15	5,25	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	15,50	21,00	35,00	71,51

Walaupun telah mencapai target yang ditentukan namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.

b. Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik	64,48%	66,17%	69,90%	72,82%	104,17%

Upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan. Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi menyebabkan bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan untuk lebih berhati – hati dan lebih mengetahui karakteristik jalan yang dilaluinya.

Menurut tabel diatas realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, namun dari sisi kecukupan sarana dan prasarana lalu lintas masih banyak kekurangan, ditambah permintaan masyarakat melalui pemerintah desa belum dapat dicukupi dikarenakan keterbatasan anggaran, Dinas Perhubungan sudah mengupayakan agar sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Purbalingga tetap dalam kondisi baik yaitu dengan melakukan perawatan/rehabilitasi sarpras perhubungan dengan rutin.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik sesuai dengan Perjanjian kinerja antara Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga pada Tahun 2022. Sarpras Perhubungan Kondisi Baik digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sarana dan prasarana perhubungan yang dimiliki Dinas Perhubungan yang berada dalam kondisi baik. Untuk Target Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik di tahun 2022 adalah sebesar 69,90% dapat terealisasi sebesar 72,82% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Sarpras Perhubungan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Sarpras yang ada}} \times 100$$

$$= \frac{825}{1133} \times 100$$

$$= 72,82\%$$

Untuk mencapai indikator sasaran Persentase Sarpras Perhubungan Kondisi Baik melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota di tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga melaksanakan pemasangan sarpras perhubungan yaitu :

Tabel 2.5. Pemasangan Sarpras Perhubungan Tahun 2022

No	Sarpras Perhubungan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	Marka Jalan	1200 m ²	798 m ²	66,5%
2	Rambu Standar	50 buah	133 buah	266%
3	RPPJ	6 buah	7 buah	116%
4	Guardrail	70 m	36 m	51,4%
5	Traffic Light	1 buah	-	-
6	Warning Light	4 buah	1 buah	25%
7	Traffic Cone	-	43 buah	-
8	Paku Marka	-	-	-
9	LPJU	200 buah	265 buah	135,5%

c. Persentase Angkutan Umum yang Aktif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat	Persentase Angkutan Umum yang Aktif	71,02	71,02	71,02	71,02	100

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Angkutan Umum yang Aktif masih sama dari data awal yaitu sebesar 71,02%, angka tersebut dihasilkan dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum}}{\text{Jumlah Kebutuhan Angkutan}} \times 100$ dimana angka jumlah angkutan umum sebesar 625 kendaraan dan jumlah kebutuhan angkutan 880 kendaraan, sehingga dapat dilakukan perhitungan $\frac{625}{880} \times 100 = 71,02\%$. Belum berubahnya angka persentase angkutan umum yang aktif dikarenakan belum adanya kajian angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, sehingga belum dapat mengetahui data riil angkutan umum yang aktif. Serta berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan pemilik angkutan merasa keberatan karena sepi penumpang, tidak sedikit pemilik angkutan yang merubah sifat kendaraannya dari kendaraan plat kuning menjadi kendaraan plat hitam, hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah kendaraan angkutan umum yang ada. Capaian indikator

sasaran ini dicapai melalui 1 Program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C telah dilaksanakan melalui pengelolaan 4 Terminal Penumpang Tipe C kewenangan kabupaten yaitu Terminal Bukateja, Terminal Kejobong, Terminal Penaruban dan Terminal Jompo. Perlu diketahui untuk terminal tipe c yang melayani penumpang dan angkutan umum hanya sisa 2 terminal dari 4 terminal yang dikelola yaitu Terminal Bukateja dan Terminal Kejobong, hal ini disebabkan karena kecenderungan angkutan umum yang beroperasi semakin menyusut dan tidak adanya penambahan armada angkutan umum yang beroperasi, terutama untuk angkutan pedesaan. Kegiatan kedua yaitu Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, realita angkutan umum saat ini cenderung lesu, namun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat khususnya pada jam sekolah dan hari pasaran. Dari 41 trayek angkutan umum yang ada hanya 33 trayek yang terlayani. Semakin berkurangnya angkutan umum yang beroperasi disebabkan karena mudahnya mendapatkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil sehingga masyarakat berubah ke moda kendaraan pribadi, berdampak pada angkutan umum yang menjadi sepi peminat, untuk itu pemerintah berupaya melakukan pembinaan angkutan umum dengan mendorong pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan dan mempertimbangkan untuk meremajakan armada. Kedepan akan dilakukan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum khususnya menghadapi perkembangan wilayah.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga,, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu : " Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 1 (satu) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat

Tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

Adapun Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Dari kedua program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

Tabel 3.1
Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.962.005.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.794.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.343.011.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 42.609.000

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.296.922.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 271.669.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 16.165.727.000
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 15.723.267.000
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 22.000.000
3	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 34.810.000
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 194.445.000
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 13.695.000
6	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 21.978.000
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 10.076.000
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 95.456.000
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000
	J U M L A H	Rp. 22.127.732.000

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Tabel 4.1 :
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan :

No	Sasaran Jangka Menengah Kemenhub	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	Kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi masih belum memadai	Masih rendahnya kondisi prasarana Jalan	Rencana pengadaan/ penambahan fasilitas perlengkapan jalan
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Kurang optimalnya penanganan dan perencanaan moda transportasi massal		Perencanaan angkutan umum massal koridor BRT, Reaktifasi Jalur Kereta Api, Pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman

I. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Pembangunan bidang Perhubungan dilakukan melalui misi ke-7, yaitu : *"Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan"* Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasaran jalan, jembatan, irigasi dan

pengairan, perumahan dan pemukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 7 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : "Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Masyarakat", dengan indikator kinerja, yaitu Rasio Ijin Trayek dan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik.

Tabel 4.2 :
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan sarpras perlengkapan jalan strategis

II. Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 2 (dua) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten
- b) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- c) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- d) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- f) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- g) Audit Dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Jalan
- h) Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- i) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2023 tersaji dalam matrik di bawah ini:

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	JENIS BELANJA	APBD 2023	AKTIVITAS 2023
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.962.005.000	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rutin	2.794.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rutin	1.832.000	Penyusunan Renja
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rutin	962.000	LKjIP, LKPJ
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rutin	4.343.011.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rutin	4.202.189.000	Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rutin	84.932.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rutin	55.890.000	Honor pengelola keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rutin	5.000.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rutin	5.000.000	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan, Belanja Honorarium Pengurus Barang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rutin	42.609.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rutin	2.552.000	Belanja Alat Listrik

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rutin	28.057.000	Belanja Tabung Gas, Cinderamata/Souvenir, Keperluan Kebersihan Kantor, ATK, Bahan Komputer, Kertas, Umbul-umbul
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rutin	4.500.000	Belanja Makan dan Minum Rapat
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rutin	1.500.000	Belanja Makan dan Minum Rapat
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rutin	6.000.000	Honorarium SIM Aset, Operator SIPD, dan Operator SIMDA
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rutin	1.296.922.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rutin	460.000	Materai, Biaya Pengiriman Paket (Pos)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rutin	126.511.000	Pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rutin	2.075.000	Baliho/spanduk, Banner, Spanduk Kain
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rutin	1.167.876.000	Honor PTT dan THL, Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, Kematian
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rutin	271.669.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rutin	194.569.000	Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2 (BPKB, KIR, STNK, pajak servis, suku cadang, BBM)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rutin	19.100.000	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, Printer, Internet, Radio HT, Radio Pancar Ulang
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rutin	58.000.000	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Bangunan Gedung Ruang PKB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Urusan	16.165.727.000	
7	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Urusan	15.723.267.000	

1	Pembangunan prasarana jalan di jalan kab/kota	Urusan	2.250.000.000	Pemasangan LPJU
2	Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/kota	Urusan	250.000.000	Pengadaan Marka Jalan 400m ² , Pemasangan CCTV
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Urusan	13.089.125.000	Pemeliharaan LPJU, Pembayaran Rekening Listrik LPJU Kab. Purbalingga
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Urusan	134.142.000	Pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu, dll)
8	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Urusan	22.000.000	
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Urusan	22.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Bukateja, Kejobong, Penaruban, Jompo)
9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Urusan	34.810.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kaupaten/Kota	Urusan	34.810.000	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Parkir, Perjalanan Dinas, Pembinaan Juru Parkir
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Urusan	194.445.000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Urusan	194.445.000	Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bukti Lulus Uji Elektronik, Pemeliharaan SIM PKB dan Belanja Cloud, Pemeliharaan Printer Smart Card
11	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Urusan	13.695.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Urusan	13.695.000	Andalalin
12	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Urusan	21.978.000	

1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Urusan	21.978.000	Pengamanan Insidentil, Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Urusan	10.076.000	
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Urusan	10.076.000	Operasi Laik Jalan, Pemilihan AbdiYasa Teladan
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Urusan	95.456.000	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Urusan	95.456.000	Pengamanan Lalu Lintas Natal, Tahun Baru dan Lebaran
15	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Urusan	50.000.000	-
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Urusan	50.000.000	BBM dan Perawatan Bus Sekolah (2 Unit), Pemeliharaan SIM Trayek,
TOTAL			22.127.732.000	

BAB V PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2023, seluruh pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2023 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan
4. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang

diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2023 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2023 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai *zero accident* dan transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat dapat terwujud.

Pubalingga, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA



RADITYA WIDAYAKA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199501 1 001